

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Kata "partisipasi", yang berarti "mengambil bagian" atau "perang serta", berasal dari bahasa Inggris. Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan yang melibatkan pikiran, otak, dan perasaan, serta bertanggung jawab atas usaha tertentu.

Partisipasi adalah gagasan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi hasil atau tujuan dari proses tersebut. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penerapan program, pembagian keuntungan atau manfaat dari pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan tersebut. Partisipasi dalam pembangunan dianggap sebagai metodologi yang membantu pelaku memahami dan menganalisa masalah yang dihadapi, mencari solusi, dan memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Menurut Verhagen, suatu kegiatan partisipasi adalah jenis komunikasi dan interaksi khusus di mana orang membagi tanggung jawab, kewenangan, dan keuntungan. Masyarakat setempat mengetahui tentang hal-hal berikut, yang mendorong pertumbuhan komunikasi dan interaksi tersebut.

- a. Kondisi yang tidak efektif dan harus diperbaiki;
- b. Kemampuan untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui kegiatan orang lain atau masyarakatnya sendiri; dan

- c. Kemampuan untuk bekerja sama dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Keyakinan bahwa iya bias membantu pekerjaan yang bersangkutan.

Keinginan politik pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi terkait dengan bentuk partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat. Dengan demikian, Raharjo menyampaikan pendapatnya tentang tiga jenis partisipasi yang berbeda, yaitu

- a. Partisipasi terbatas: partisipasi hanya dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu untuk mencapai hasil pembangunan yang sesuai, tetapi hanya untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi fasilitas nasional dan komunitas pembangunan.
- b. Partisipasi penuh: partisipasi secara menyeluruh dalam semua aspek kegiatan pembangunan.
- c. Mobilisasi tanpa partisipasi: pemerintah menggerakkan masyarakat, tetapi masyarakat terbatas pada kepentingan pribadi. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan atau memengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Hobley menemukan tujuh jenis partisipasi berdasarkan gagasan di atas. Mereka adalah sebagai berikut:

- a. partisipasi informasi pasif yang terbatas pada pertukaran informasi dengan kelompok profesional di luar kelompok sasaran;
- b. partisipasi informasi masyarakat sangat terbatas dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang mempengaruhi.
- c. Partisipasi Masyarakat mengambil bagian dengan meminta arahan;

- d. Konsultatif mencegah membuat keputusan bersama;
- e. Partisipasi Fungsional Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek.
- f. Partisipasi interaktif: Masyarakat berpartisipasi dalam mengevaluasi kegiatan untuk perencanaan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan;
- g. Mobilisasi Zelf: Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada.

Sondang P Siagian mengatakan bahwa ada dua jenis partisipasi dalam pembangunan: partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi pasif terjadi ketika masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan yang ada. Partisipasi aktif terjadi ketika masyarakat melakukan pembangunan sehingga mereka dapat berpartisipasi. Partisipasi aktif dapat terjadi dalam situasi berikut: Dengan menggunakan lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat, ambil bagian dalam memikirkan nasib sendiri.

- a. Menunjukkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat yang tinggi dengan tidak memberikan penentuan nasib sendiri kepada orang lain, seperti pemimpin dan tokoh masyarakat yang ada, baik secara formal maupun informal.
- b. Memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara.
- c. Mentaati berbagai peraturan atau arahan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kerelaan adalah pengorbanan yang dibutuhkan oleh pembangunan untuk hal-hal yang lebih penting dan kepentingan umum.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi bias secara sederhana didefinisikan sebagai partisipasi seseorang, masyarakat, atau kelompok dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti bahwa individu, masyarakat, atau kelompok selalu dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang mampu mendukung keberhasilan program pembangunan dengan berbagai jenis atau bentuk partisipasi. Ini termasuk partisipasi melalui pikiran, yang diberikan masyarakat dalam rapat atau pertemuan. Sangat penting bagi masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam diskusi dengan kehadiran seseorang di pertemuan. Bantuan tenaga, yang diberikan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan atau perbaikan desa, membantu orang lain dengan memberikan minuman atau makanan seadanya tanpa ada timbal balik (jasa). Bantuan harta benda, yang diberikan seseorang dalam berbagai kegiatan pembangunan atau perbaikan desa, membantu orang lain dengan memberikan minuman atau makanan seadanya.

Dussel drop mengatakan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam berbagai hal:

- a. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok
- b. Bergabung dengan kelompok masyarakat
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi untuk mendorong orang lain untuk berpartisipasi.
- e. Menggerakkan sumber daya masyarakat;
- f. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan; dan
- g. Menggunakan dengan baik hasil dari kegiatan masyarakat.

2.1.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat: Pada saat ini, pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kota sedang mengalami kegagalan. Partisipasi berarti mobilisasi, seperti berpartisipasi dalam pembangunan, atau memilih tindakan berdasarkan kesadaran sendiri.

Pengertian Partisipasi Masyarakat Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan adalah penting dan penting bagi keberhasilan pembangunan.

Lyadi (2019:14) mengatakan partisipasi masyarakat adalah kontribusi sukarela masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, di mana mereka ikut menikmati manfaatnya, dan dilibatkan dalam menilai program untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan pembangunan di daerahnya sendiri. Ini dilakukan untuk menciptakan lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah yang tidak akan terungkap tanpa partisipasi masyarakat.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi keikutsertaannya terlibat dalam program yang ditawarkan pemerintah yaitu pada masyarakat, Ali Nurdin (2000) Partisipasi bergantung pada ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat, serta tingkat pendidikan mereka. Faktor sosial yang

berkembang termasuk geografis, organisasi dan budaya lokal, ekonomi, dan sosial politik, yang dapat digunakan para perencana untuk mengetahui bagaimana masyarakat terlibat dalam pembangunan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dikategorikan dalam tiga (tiga) kategori:

a. Aspek Ekonomi

Pada tingkat lokal, karakteristik ekonomi wilayah perdesaan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan mayoritas pekerjaan penduduknya. Seperti pengkategorian desa yang dilakukan oleh kementerian pemberdayaan daerah tertinggal oleh pemerintah, yang membaginya menjadi dua kategori: desa tertinggal dan desa tidak tertinggal. Menurut Departemen Dalam Negeri, klasifikasi desa didasarkan pada tipologi desa atau karakteristik mayoritas pekerjaan penduduknya, seperti nelayan, perkebunan, perladangan, persawahan, industri, dan lain-lain. Salah satu kriteria yang membuat desa dapat digolongkan menjadi desa adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan penduduk dan mayoritas pekerjaan penduduknya adalah karakteristik ekonomi desa yang ditinjau berdasarkan hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam penelitian ini.

b. Aspek Sosial Budaya

Perbedaan karakteristik suatu wilayah dapat dengan mudah diidentifikasi dari sosial budaya yang berkembang pada masyarakat setempat. Bahkan pembagian teritorial suatu wilayah banyak dipengaruhi oleh sosial budaya

yang berkembang pada masyarakat yang mendiaminya, karena aspek sosial budaya adalah arena yang sangat luas untuk memahami hubungan antara partisipasi masyarakat dengan karakteristik sosial budaya masyarakat lokal yang ada.

Pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam paradigma ini adalah fakta-fakta sosial. Secara garis besar fakta sosial terdiri dari dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Kedua tipe ini mempunyai dua sifat, yaitu (1) nilai-nilai umum, dan (2) norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam subkultur.

Untuk alasan ini, variabel sosial budaya lebih difokuskan dalam penelitian ini daripada variabel sebelumnya. Ini telah diteliti sebelumnya terkait dengan keberadaan partisipasi masyarakat. Menurut pemahaman ilmu sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain untuk hidup sendiri. Sementara masyarakat lokal didefinisikan sebagai sekelompok individu yang bertempat tinggal di suatu teritorial wilayah dimana faktor utama yang paling penting adalah interaksi sosial yang lebih besar di antara anggotanya dibandingkan dengan penduduk di luar batas teritorialnya, kesadaran yang dihasilkan dari saling membutuhkan dan persamaan kepentingan pada akhirnya akan membentuk kelompok yang sering disebut sebagai masyarakat.

c. Aspek Geografi Wilayah

Aspek geografis suatu desa yang dipertimbangkan dalam hubungannya dengan tingkat partisipasi masyarakat pada penelitian ini meliputi jarak

desa dengan pusat kota, aksesibilitas ekstra dan intra serta sumberdaya alam yang dimilikinya. Pada kasus dimana letak geografis wilayah suatu desa jauh dari kota maka keadaan yang biasa dijumpai minimnya perhatian dalam pembangunan. Keberadaan geografis desa yang didalamnya menyangkut sumberdaya alam yang dimiliki, telah menjadikan suatu wilayah memiliki potensi yang lebih kompetitif dibandingkan dengan wilayah lainnya secara ekonomi. Dalam suatu keadaan ideal dimana keberadaan sumberdaya alam khususnya barang tambang golongan C dalam satu desa dimanfaatkan dengan baik maka keberadaan prasarana transportasi pada desa tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan desa lainnya yang tidak memilikinya. Dikaitkan dengan konteks partisipasi maka anggapan yang muncul adalah keberadaan penambangan pasir dan batu (galian C) yang merupakan bahan dasar pembuatan jalan akan berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat khususnya dalam berkontribusi untuk menyumbang bahan konstruksi.

2.1.5 Pengertian Pembangunan

Pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pengertian pembangunan diartikan sebagai suatu “proses” pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya (Latif, 2019). Menurut Aprillia Theresia dkk. (2015),

pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan, sedangkan menurut Jacobus Ranjabar (2015:), teori mula tentang pembangunan ditandai oleh kenyataan bahwasanya konsep pembangunan dianggap sama dengan pertumbuhan ekonomi. Rochajat Harun, (2012:3), secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Pembangunan menurut Siagian dalam Nurman (2015) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Mardiakanto Totok dan Soebianto Poerwoko, (2015), pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan ini.

Menurut (Siagian, 2014) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau

untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Meskipun demikian, apapun maksud, tujuan, dan makna, yang terkandung dalam pengertian yang dimaksudkan dalam satu istilah yang sama yaitu pembangunan, kesemuanya akan selalu merujuk pada sesuatu yang memiliki arah positif, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan umat manusia secara individual maupun bagi masyarakatnya, Hadad (Latif, 2019). Nurman (2015), ada tiga tujuan inti dari suatu pembangunan, yaitu:

- 1) Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- 2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai sikap cultural dan kemanusiaan dan kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- 3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau Negara-negara lain, maupun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Menurut Kuncoro (2010), pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama contoh pendidikan yang merata di seluruh daerah di Indonesia, kesehatan yang semakin membaik, angka kematian saat kelahiran yang berkurang, masyarakat taat terhadap aturan yang berlaku, pariwisata yang semakin berkembang, kriminalitas yang terbenahi sedikit demi sedikit, ketertiban masyarakat. Fisik merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan diraba seperti badan, bangunan, jalan, jembatan dan lain-lain. Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, pengawasan, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil bagi masyarakat. Pembangunan fisik berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan Ketaren dalam Rahmah (2016) adalah Pembangunan fisik sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk memengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang diperlukan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga

guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup keadilan, perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang manfaat tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan, pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya.

2.1.6Pembangunan Desa

1. Pengertian Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Tentang Desa pada Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan : Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi dapat dikatakan bahwa Desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Di mana sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa

kampung/dusun/banjar/jorong. Selain itu terdapat Tipologi Desa seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Tentang Desa pada Bab 1 Pasal 1 yaitu : “Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa)”.

Tipologi Desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri berdasarkan Permendesa No. 16 Tahun 2018, yaitu :

- 1) Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- 2) Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- 3) Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

- 4) Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- 5) Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2.1.7 Pembangunan Infrastruktur

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (dalam Akbar Effendi, 2014) menyebutkan, bahwa pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunanbangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pembuangan limbah listrik, penyediaan air, pembangunan limbah, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa. Pembangunan itu baik dari segi perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, harus membuahkan hasil dari masyarakat luas. Artinya, bahwa bentuk serta cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk propek pengembangan potensi dan sumber kehidupan dimasa yang akan datang, bahwa sifat dan watak pembangunan yang akan dicapai itu harus sedemikian rupa bercirikan multidimensional, artinya bahwa pembangunan itu tidak harus saja mencakup suatu aspek saja melainkan harus mencakup seluruh aspek kehidupan (Mustanir & Jusman, 2016).

2.1.8 Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya.

Menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2005) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Misalnya dalam pembangunan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi

beberapa sektor lainnya seperti, pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar pemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi.

Dari definisi tersebut Grigg membagi infrastruktur dalam dua belas kategori yang meliputi :

- 1) Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengelolaan air (treatment plant).
- 2) Sistem pengelolaan air limbah: pengumpul, pengelolaan, pembuangan dan daur ulang.
- 3) Fasilitas pengelolaan limbah (padat).
- 4) Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi.
- 5) Fasilitas lintas air dan navigasi.
- 6) Fasilitas transportasi : jalan rel, bandar udara, termasuk didalamnya adalah tanda dan fasilitas pengontrol.
- 7) Sistem transit publik.
- 8) Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi
- 9) Fasilitas gas alam
- 10) Gedung publik : Kantor, sekolah, rumah sakit
- 11) Fasilitas perumahan public
- 12) Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion.

Serangkaian konsep yang disebutkan dengan berbagai teori, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa adalah suatu proses keikutsertaan sekelompok orang secara aktif dalam setiap usaha/kegiatan untuk melakukan perubahan secara terus menerus dan terencana guna untuk membawa perubahan yang lebih baik yang ditunjang dengan sarana fisik demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN	METODE	HASIL
1.	Veril Sella Marlita, Sugeng Widodo (2020)	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk	Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk	Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat di Desa Sidorejo dengan model penelitian interaktif	Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat di Desa Sidorejo relatif tinggi, namun perlu adanya kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat, karena terbatasnya pemberian ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dari perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan hingga pengawasan setelah proses pembangunan dilakukan masih sangat terbatas.

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN	METODE	HASIL
2.	Maria Efrita Jingga (2022)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Komba, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.	Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan selama melakukan penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Komba, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dalam bentuk; Pertama dalam bentuk Uang yaitu kesediaan dan keterlibatan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Kedua dalam bentuk tenaga, keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan guna untuk menyukkseskan dan memperlancar pembangunan infrastruktur dalam bentuk gotong royong dan kerja bakti, Ketiga dalam bentuk pikiran dan ide, yakni tentang pemberian dan keaktifan masyarakat dalam mengemukakan ide, pikiran serta saran untuk pembangunan infrastruktur yang

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN	METODE	HASIL
					akan di laksanakan.
3.	Erick, Saputra (2021)	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Desa Di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa 2020.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dan peran pemerintah Desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa	Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa, Kepala Desa, sekretaris Desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Usar Mapin Kecamatan Alas Barat	Hasil penelitian ini bahwa partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah Desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Usar Mapin Bahwa pembangunan infrastruktur dari pemerintah Desa yang ada pada perencanaan pembangunan 2020 adalah, Pembangunan perbaikan jalan Gang, Pembuatan Talud, gorong-gorong, perbaikan kantor Desa dan pngerasan jalan atau pengaspalan jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya
4.	Riskayanti Riskayanti, Budi Setiawati, Ansyari Mone (2022).	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat informan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN	METODE	HASIL
		Kabupaten Gowa.	di desa Romanglasa Kecamatan Bontonomp Kabupaten Gowa	sebanyak 11 orang terdiri dari kepala desa Romanglasa ,sekretaris desa Romanglasa, 2 anggota BPD, 1 anggota kepala Dusun, 1 anggota RT, 1 anggota RW, 1 anggota LSM dan 3 orang masyarakat	Kabupaten Gowa dalam bentuk partisipasi pikiran masih sangat minim dilihat dari bagaimana masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena pemerintah membatasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam hal perumusan masalah sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap pembangunan infrastruktur dalam proses perencanaan Musrebang dan RPJMDes,partisipasi tenaga dalam bentuk gotong royong dan kerja bakti ,partisipasi keahlian dalam bentuk keterampilan masyarakat dimiliki,partisipasi barang dalam bentuk alat dan perkakas yang dapat digunakan untuk membantu pengerjaan pembangunan infrastruktur , partisipasi uang dalam bentuk dana atau terprosedur.

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN	METODE	HASIL
5.	Musyafa, Dani Sufyan (20 21)	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.	Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.	Metode Penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial.	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Karangduren dalam pembangunan infrastruktur kurang atau rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan, masih kurangnya bentuk sumbangan barang atau peralatan dan bahan-bahan bangunan.
6.	SUhaeri, Suhaeri (20 22)	Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep	Teknik Pengumpulan data interview, observasi dan dokumentasi, dengan analisa data dengan pendekatan reduksi data dan verifikasi data.	Hasil Penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dalam pembangunan infrastruktur pedesaan sangat baik terlihat. 1) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN	METODE	HASIL
					keputusan di Desa Pinggir Papas dengan melibatkan semua elemen masyarakat desa, 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pinggir Papas sangat baik guna menunjang pelaksanaan yang berwujud dan berkualitas, 3) Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat dalam pembangunan infrastruktur Pemerintah Desa Pinggir Papas ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, 4) Partisipasi dalam evaluasi Pembangunan infrastruktur pedesaan, masyarakat Desa pinggir papas memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan
7.	Rahmawati , Ermi (2020)	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur : Studi deskriptif masyarakat RW 01 Kelurahan Cipadung Kecamatan	mengetahui proses pembangunan infrastruktur di Kelurahan Cipadung, partisipasi masyarakat Kelurahan Cipadung	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar dapat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Cipadung merupakan partisipasi yang aktif dan partisipatif dalam

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN	METODE	HASIL
		Cibiru Kota Bandung.	dalam pembangunan serta bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Cipadung.	menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi terstruktur dengan Masyarakat Kelurahan Cipadung dan dokumentasi.	berbagai kegiatan termasuk pembangunan. Peran pemerintah juga terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam partisipasi di masyarakat serta relasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat Kelurahan Cipadung menjadi salah satu faktor yang mendukung partisipasi aktif di masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Cipadung termasuk dalam kategori partisipasi self mobilization yang artinya berpartisipasi secara mandiri, sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Partisipasi Merupakan ikut serta dalam proses pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Nanga Meje Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai perubahan yang

diinginkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti keaktifan waktu, tenaga dan dana serta kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangka penyumbangan ide bagi kepentingan pembangunan. Oleh karenanya masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian

